

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah tingkat pertumbuhan penduduknya yang tinggi dan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia yang masih masuk kategori menengah ke bawah. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi umum pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan Ekonomi menunjukkan peningkatan dalam produksi barang maupun jasa dalam suatu perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi ini merupakan salah satu indikator penting dalam melakukan analisis pembangunan ekonomi (Nuraini, 2017).

Berdasarkan Undang-Undang 1945, Indonesia merupakan negara yang berbentuk kesatuan. Hubungan dan mekanisme pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah diatur dalam penjelasan Peraturan Pemerintah No 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa negara republik Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan yang dalam penyelenggaraan pemerintahannya merupakan menganut asas desentralisasi yang dilakukan di daerah dan kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan luas wilayah yang luas, secara administratif Indonesia



dibagi menjadi beberapa provinsi dan setiap provinsi terdiri beberapa Kabupaten/Kota. Jumlah Provinsi yang terus bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk maupun permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Pengelolaan pemerintahan daerah, baik ditingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota memasuki area baru sejalan dengan dikeluarkannya UU No 22 Tahun 1999 dan UU No 25 Tahun 1995 yang mengatur tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.

Desentralisasi di Indonesia ditandai dengan lahirnya Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana setiap daerah mempunyai hak dalam mengelola keuangannya sendiri. Maka setiap daerah terutama daerah-daerah yang memiliki potensi untuk berkembang dituntut agar dapat meningkatkan kegiatan-kegiatan pemerintahan. Tujuan Ekonomi yang hendak dicapai melalui desentralisasi adalah mewujudkan kesejahteraan melalui penyediaan pelayanan publik yang lebih merata dan memperpendek jarak antara penyedia layanan publik dan masyarakat lokal. Peningkatan pembangunan infrastruktur di sektor publik dipandang perlu dilakukan agar fasilitas publik dan penunjang lainnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan akan menarik investor untuk berinvestasi serta membuka usaha di daerah, tentunya hal tersebut akan meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di daerah.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan sejumlah daerah memiliki porsi belanja pegawai mencapai 70% - 80% dari total



Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD). Porsi belanja pegawai yang terlalu besar perlu mendapatkan perhatian yang khusus. Belanja infrastruktur dan belanja modal seharusnya lebih tinggi untuk mendukung pembangunan daerah dan nasional.

Berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah tidak lepas dari kesiapan masing-masing daerah dalam hal pendanaan, maupun sumberdaya manusianya. Kemampuan keuangan suatu daerah diukur melalui seberapa besar peranan atau kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai seluruh pengeluaran daerah, termasuk belanja rutin daerah.

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan fisik produksi barang/jasa yang berlaku di suatu Negara, seperti penambahan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, pertumbuhan jumlah sekolah, penambahan produksi sector jasa dan penambahan produksi barang modal. (Sukirno,2013).

Gambaran umum perkembangan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan pada tahun 2020 menurun ini dibuktikan dari hasil perhitungan yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu sebesar 0,11%. Penurunan pertumbuhan ekonomi ini disebabkan oleh adanya bencana pandemi covid-19. Lesunya pertumbuhan ekonomi global pada beberapa tahun terakhir membuat pertumbuhan ekonomi banyak negara melambat, pelambatan pertumbuhan ekonomi seperti anjloknya konsumsi rumah tangga tidak terlepas dari kenaikan harga pangan, mahal nya harga pangan



membuat masyarakat mengerem belanjanya. Penurunan pertumbuhan negara Indonesia berdampak pula pada daerahnya.

**Tabel 1.1**  
**Belanja Barang/Jasa, Belanja Pegawai, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Sumatera Selatan**

Tahun	Belanja Barang/jasa (Ribu Rupiah)	Belanja Pegawai (Ribu Rupiah)	Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) (persen)	Pendapatan Asli Daerah (Ribu Rupiah)
2018	1.375.068.372,16	1.657.583.970,19	6,04	3.528.010.712,18
2019	1.405.117.520,74	1.757.169.664,44	5,69	3.494.510.853,25
2020	1.411.206.870,21	1.772.464.135,74	-0,11	3.375.100.984,84
2021	1.811.885.209,42	1.923.672.646,66	3,58	3.865.463.033,09
2022	2.042.434.073,43	2.092.571.068,58	5,23	4.930.955.849,52

Sumber: bps.sumsel.2023

Berdasarkan tabel 1.1 diatas yang diperoleh dari BPS provinsi Sumatera Selatan nilai PDRB atas harga konstan 2010 Sumatera Selatan pada tahun 2022 meningkat. Nilai PDRB Sumatera Selatan atas dasar harga konstan 2010, mencapai 343,48 triliun rupiah. Angka tersebut naik dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 326,41 triliun rupiah. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan tahun 2022 tercatat sebesar 5,23 persen setelah tahun sebelumnya hanya tumbuh sebesar 3,58 persen



dan 0,11 persen. Perbaikan kinerja ekonomi tahun 2022 terutama ditopang oleh peningkatan kinerja lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian serta Industri Pengolahan seiring perbaikan harga komoditas. Aktivitas masyarakat yang kembali normal turut mendorong aktivitas konsumsi yang meningkatkan kinerja lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran. Pada tahun 2022, hampir seluruh kategori lapangan usaha mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif kecuali kategori Jasa Keuangan dan Asuransi yang mengalami kontraksi sebesar 0,60 persen. Tiga kategori utama yang memiliki kontribusi terbesar dalam perekonomian Sumatera Selatan yaitu Pertambangan dan Penggalian mengalami pertumbuhan sebesar 6,27 persen; Industri Pengolahan tumbuh sebesar 4,39 persen; dan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tumbuh sebesar 3,82 persen.

Oleh karena itu, untuk mengejar peningkatan pertumbuhan ekonomi provinsi Sumatera Selatan, yakni dengan menaikkan belanja rutin seperti belanja barang/jasa dan belanja pegawai.

Realisasi Belanja Barang/Jasa sejak tahun 2018-2022 mengalami peningkatan terus menerus. Bila dilihat pada tahun 2018 Belanja Barang/Jasa sebesar 1.375.068.372,16, lalu pada tahun 2019 sebesar 1.405.117.520,74, pada tahun 2020 sebesar 1.411.206.870,21, kemudian pada tahun 2021 sebesar 1.811.885.209,42, dan pada tahun 2022 sebesar 2.042.434.073,43.

Belanja Pegawai Sama halnya dengan Realisasi Belanja



Barang/Jasa sejak tahun 2018-2022 mengalami peningkatan terus menerus. Bila dilihat pada tahun 2018 Belanja Pegawai sebesar 1.657.583.970,19 , lalu pada tahun 2019 sebesar 1.757.169.664,44, pada tahun 2020 sebesar 1.772.464.135,74, kemudian pada tahun 2021 sebesar 1.923.672.646,66, dan pada tahun 2022 sebesar 2.092.571.068,58.

Pendapatan Asli Daerah idealnya menjadi sumber utama pendapatan lokal. Sumber pendapatan lain relatif fluktuatif dan cenderung diluar kontrol (kewenangan) pemerintah daerah (Sidik, 2002; Bappenas 2003). Data menunjukkan bahwa kontribusi PAD meningkat dari sebesar 3.375.100.984,84 ribu rupiah pada tahun 2020 menjadi sebesar 3.865.463.033,09 ribu rupiah pada tahun 2021 sampai tahun 2022 sebesar 4.930.955.849,52 ribu rupiah, dengan sumber utama yang mempunyai kontribusi yang besar dalam pemasukan pendapatan asli daerah yaitu penerimaan dari pajak daerah dan retribusi. Diharapkan dengan adanya penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi daerah dan dapat juga meningkatkan Belanja rutin pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan semakin baik.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah merupakan tujuan yang diharapkan oleh suatu daerah, untuk pencapaian tujuan tersebut diharapkan kepada pemerintah daerah untuk menjalankan otonomi daerahnya yang telah diberikan kewenangan dari pemerintah pusat untuk mengelola keuangan pemerintah daerah masing-masing secara berkelanjutan akan menyebabkan peningkatan tingkat Pertumbuhan



Ekonomi. Pendapatan Asli Daerah dalam penelitian ini dijadikan sebagai variabel pemoderasi untuk memperkuat maupun memperlemah hubungan Belanja Barang/jasa dan Belanja Pegawai terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Penelitian ini dimotivasi karena adanya perbedaan hasil penelitian - penelitian terdahulu, penelitian ini mencoba untuk mereplikasi dan mengeksplorasi penelitian yang dilakukan oleh Ni Made Wayan dan Fridayana Yudiatmaja (2016) yang meneliti pengaruh PAD, DAU dan Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Buleleng, sedangkan penelitian menurut Edi Susanto dan Marhamah (2016) PAD dan DAK berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi sedangkan DAU berpengaruh negatif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur.

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini termotivasi mendorong penulis tertarik menguji kembali variabel independen dan dependen diatas tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi umum terhadap Belanja Modal. Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian tersebut. Penulis menggunakan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Moderasi dan menjadikan Pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen, tempat penelitian dilakukan di Provinsi Sumatera Selatan.

Dari latar belakang yang telah di paparkan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Belanja Barang/jasa dan Belanja Pegawai Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**



dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Moderasi Di Provinsi Sumatera Selatan”.

### 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan dapat dirumuskan Bagaimana Pengaruh Belanja Barang/jasa ( $X_1$ ) dan Belanja Pegawai ( $X_2$ ) terhadap Pertumbuhan Ekonomi ( $Y$ ) dengan Pendapatan Asli Daerah ( $Z$ ) sebagai variabel moderasi di Provinsi Sumatera Selatan?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Pengaruh Belanja Barang/jasa ( $X_1$ ) dan Belanja Pegawai ( $X_2$ ) terhadap Pertumbuhan Ekonomi ( $Y$ ) dengan Pendapatan Asli Daerah ( $Z$ ) sebagai variabel moderasi di Provinsi Sumatera Selatan

### 1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini adalah dapat mengetahui Pengaruh Belanja Barang/jasa ( $X_1$ ) dan Belanja Pegawai ( $X_2$ ) terhadap Pertumbuhan Ekonomi ( $Y$ ) dengan Pendapatan Asli Daerah ( $Z$ ) sebagai variabel moderasi di Provinsi Sumatera Selatan.







Edit dengan WPS Office